

**PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN PENGAWASAN
TERHADAP PENGELOLAAN ANGGARAN BERKONSEP VALUE FOR
MONEY PADA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi Empiris SKPD Provinsi Riau)**

Oleh:

Debi Putri Pertiwi

Pembimbing: R. Adri S. Surya dan Al Azhar

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email: dputripertiwi@yahoo.com

*The Influence of Accountability, Transparency, and Control to Budgeting
Management of The Value for Money Concept of Government Institute (SKPD) in
Riau Province*

ABSTRACT

The research aims to examine the influence of accountability, transparency, and and control to budgeting management of the value for money concept of government institute in Riau Province. The research population of all employees echelon 3 & 4 in the local government SKPDs Riau Province. The data of this research were obtained from questionnaires. The sample used by 86 respondents were selected using purposive sampling and analyzed using multiple regression with Software SPSS for Windows Version 19. The results showed that accountability, transparency, and and control to budgeting management give a effect to the budgeting management of the value for money concept of goverment Institute.

Keywords: Accountability, Transparency, Control, Budgeting management of the value for money concept

PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu pertanggungjawaban kepada publik. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara akuntabel, transparan, dan bertanggungjawab.

Akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban tersebut diharapkan masyarakat terwujud dalam pengelolaan anggaran daerah.

Wujud dari akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran dalam pelayanan masyarakat adalah dengan dibuatnya laporan pertanggungjawaban.

Akuntabilitas dan transparansi adalah azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari pengelolaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai kedaulatan tertinggi. Ciri utama dalam pengelolaan anggaran adalah

akuntabilitas dan transparansi. Salah satu elemen penting dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik (good governance) adalah adanya pengelolaan anggaran yang baik.

Pengelolaan anggaran yang baik sangat penting bagi kelangsungan dan perkembangan organisasi karena erat kaitannya dengan kelangsungan kesejahteraan masyarakat banyak. Pengelolaan anggaran yang baik merupakan prinsip *Value for Money* dan mutlak dilakukan. Implementasi prinsip *Value for Money* diyakini dapat memperbaiki kinerja sektor publik. *Value for Money* merupakan prinsip pengelolaan anggaran sektor publik yang mendasar pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. *Value for Money* dapat tercapai apabila organisasi telah menggunakan biaya input paling kecil untuk mencapai output yang optimum dalam rangka mencapai tujuan organisasi (Mardiasmo, 2005:7).

SKPD-SKPD merupakan bagian dari sektor publik yang selalu disoroti karena pengelolaan anggaran yang tidak efisien, kebocoran dana, pemborosan, dan juga selalu merugi. Tuntutan baru agar SKPD-SKPD ini meningkatkan pelayanan melalui perwujudan *Value for Money* dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatannya. *Value for Money* merupakan konsep pengelolaan pelayanan umum yang berdasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Pengelolaan anggaran dikaitkan dengan *Value for Money* karena masih banyaknya anggaran yang belum dilakukan secara ekonomi (biaya yang tinggi, hasil yang minim atau anggaran

digunakan tidak berdasarkan pada kebutuhan atau skala prioritas, serta anggaran yang boros).

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang **“Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Pengawasan terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value for Money pada Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada SKPD Provinsi Riau).”**

TINJAUAN PUSTAKA

Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan adalah perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan perancangan yang dibuat dan melibatkan semua anggota yang di sebuah organisasi. Pengelolaan keuangan daerah berarti mengurus dan mengatur keuangan daerah itu sendiri dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas nyata dan bertanggung jawab.

Menurut Nordiawan (2006:48), “anggaran dapat dikatakan sebagai pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu dalam ukuran finansial.” Jadi pengertian anggaran adalah pernyataan mengenai estimasi kinerja yang akan dicapai selama periode tertentu dan dinyatakan dalam ukuran finansial.

Anthony & Govindrajana (2005 : 17) menegaskan bahwa anggaran perlu disiapkan secara detail dan melibatkan manajer pada setiap level organisasi.

Keterlibatan manajer dalam penyusunan anggaran khususnya dalam anggaran sektor publik diharapkan berpengaruh positif terhadap kinerja pelayanan yang diberikan. Pernyataan ini menunjukkan bahwa keterlibatan setiap personel yang kompeten pada setiap level organisasi dapat mendorong peningkatan kinerja organisasi. Dalam konteks pengelolaan keuangan daerah, implementasi program pemerintah daerah yang mengkonsumsi sejumlah sumber daya tertentu dapat dievaluasi melalui kinerja yang dihasilkan oleh setiap satuan kerja

Konsep Value for Money

Value for Money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2005:4), dimana pengertian dari ketiga konsep tersebut adalah Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas

Manfaat yang diharapkan dapat diambil dengan adanya implementasi konsep *Value for Money* pada organisasi sektor publik (Harryanto dkk, 2007:9), antara lain:

1. Efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran;
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik;
3. Biaya pelayanan yang murah karena hilangnya inefisiensi dan penghematan dalam penggunaan resources;
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik; dan

5. Meningkatkan publik cost awareness sebagai akar pelaksanaan pertanggungjawaban publik.

Indikator *Value for Money* dibagi menjadi dua bagian (Mardiasmo, 2005:130), yaitu:

1. Indikator alokasi biaya (ekonomi dan efisiensi)
 Ekonomi artinya pembelian barang dan jasa dengan tingkat kualitas tertentu pada harga terbaik (*spending less*). Efisiensi artinya output tertentu dapat dicapai dengan sumber daya yang serendah-rendahnya (*spending well*).
2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)
 Efektivitas artinya kontribusi output terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan (*spending wisely*).

Konsep Good Corporate Governance

Good Corporate Governance dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Menurut Moeljono (2005:88), "*Good Corporate Governance* sebagai prinsip dasar tata kelola usaha". Menurut Pieris dan Nizam (2008:131), "*Good Corporate Governance* dapat diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku".

Menurut Pieris dan Nizam (2008:132), prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* adalah sebagai berikut:

1. Prinsip Partisipasi
2. Prinsip Hukum dan Aturan (*rule of law*)
3. Prinsip Transparansi
4. Prinsip Responsivitas
5. Prinsip Orientasi Konsensus
6. Prinsip Keadilan dan Kewajaran
7. Prinsip Efisiensi dan Efektivitas
8. Prinsip Akuntabilitas
9. Prinsip Visi Strategis

Adapun beberapa manfaat penerapan *Good Corporate Governance* adalah (Maksum, 2005:8) bahwa

1. Proses pengambilan keputusan akan berlangsung lebih baik.
2. Akan memungkinkan dihindarinya atau sekurang-kurangnya dapat diminimalkannya tindakan penyalahgunaan wewenang oleh pihak direksi dalam pengelolaan perusahaan.
3. Motivasi dan kepuasan kerja karyawan juga akan meningkat.
4. Meningkatkan kualitas laporan keuangan perusahaan.

Akuntabilitas

Menurut Mahmudi (2010:23), “akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (principal)”.

Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *stewardship*. *Stewardship* mengacu pada pengelolaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efisien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu pada pertanggungjawaban oleh seorang *steward* kepada pemberi tanggung jawab.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*), bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*). Tuntutan yang kemudian muncul adalah perlunya dibuat laporan keuangan eksternal yang dapat menggambarkan kinerja sektor publik.

Akuntabilitas pengelolaan anggaran adalah kewajiban Pemerintah Daerah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang terkait dengan pemerintahan dan penggunaan uang publik kepada pihak yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (DPRD dan masyarakat).

Transparansi

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002:18)

Sedangkan menurut Mardiasmo (2005:6), “Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat”.

Menurut S.H Sarundajang (2005 : 276), transparansi akan menciptakan

kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui informasi dan menjamin kemudahan dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai, karena informasi merupakan suatu kebutuhan penting bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan itu, pemerintah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan pada masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan jalur komunikasi seperti brosur dan pengumuman media massa. Pemerintah daerah perlu menyediakan kebijakan, kebijakan itu memperjelas informasi yang bersifat rahasia.

Tujuan dari transparansi adalah membangun rasa saling percaya antara pemerintah dengan publik dimana pemerintah harus memberi informasi akurat bagi publik yang membutuhkan, terutama informasi handal yang berkaitan dengan masalah hukum, peraturan, dan hasil yang dicapai dalam proses pemerintahan, adanya mekanisme yang memungkinkan masyarakat mengakses informasi yang relevan, adanya peraturan yang mengatur kewajiban pemerintah daerah menyediakan informasi kepada masyarakat, serta menumbuhkan budaya di tengah masyarakat untuk mengkritisi kebijakan yang dihasilkan pemerintah daerah (Sedarmayanti, 2009:289).

Pengawasan

Pengawasan (*controlling*) adalah proses pemantauan kegiatan untuk menjaga bahwa suatu kegiatan dilaksanakan terarah dan menuju kepada tercapainya tujuan yang telah direncanakan dengan mengadakan

penilaian, tindakan kooperatif terhadap kegiatan-kegiatan yang menyimpang atau kurang tepat dengan sasaran yang dituju (Sukirno, 2005:99).

Sedangkan menurut Mathis dan Jackson (2006: 303), pengawasan merupakan sebagai proses pemantauan kinerja karyawan berdasarkan standar untuk mengukur kinerja, memastikan kualitas atas penilaian kinerja dan pengambilan informasi yang dapat dijadikan umpan balik pencapaian hasil yang dikomunikasikan ke para karyawan.

Tujuan pengawasan pada dasarnya adalah untuk mengamati apa yang sungguh-sungguh terjadi serta membandingkannya dengan apa yang seharusnya terjadi. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, maka penyimpangan atau hambatan itu diharapkan dapat segera dikenali agar dapat diambil tindakan koreksi. Melalui tindakan koreksi ini, maka pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan diharapkan masih dapat tercapai secara maksimal (Pratuvandi, 2005:19).

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Berkonsep Value For Money

Akuntabilitas merupakan suatu upaya untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai segala aktivitas dan kinerja yang telah dilakukan oleh suatu entitas kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Terwujudnya akuntabilitas merupakan tujuan utama dari reformasi sektor publik. Tuntutan akuntabilitas mengharuskan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekankan pada pertanggungjawaban horisontal (*horizontal accountability*), bukan hanya

prtanggungjawaban vertikal (*vertical accountability*).

Anugriani (2014) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah Kabupaten Bone yang mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Adrianto (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis, bahwa akuntabilitas memiliki pengeruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* karna dalam setiap pelaksanaan anggaran tersebut diperlukan pertanggungjawaban dan terbuka untuk diperiksa. Untuk menjamin efisiensi dan efektivitas suatu anggaran.

H₁: Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep Value for Money.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. (Sumber: Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri, 2002).

Transparansi dapat dilihat dari tiga aspek, yaitu adanya kebijakan terbuka terhadap pengawasan, adanya

akses informasi sehingga masyarakat dapat menjangkau setiap segi kebijakan pemerintah, dan berlakunya prinsip *check and balance* antara lembaga eksekutif dan legislatif

Adrianto (2012) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran di Universitas Bina Nusantara yang mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwaTransparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis, bahwa transparansi memiliki pengeruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* karna dalam setiap penyelenggaraan pemerintah harus terbuka masyarakat umum. Agar pengumuman anggaran bisa didapat setiap waktu dan mudah didapatkan oleh publik.

H₂:Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep Value for Money.

Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value For Money

Pengawasan anggaran daerah dilaksanakan untuk meminimalisir kebocoran anggaran daerah, dengan metode pembukuan yang tertib dan metode pengawasan keuangan daerah sesuai dengan perundang - undangan yang berlaku. Pengawas Extern

Pengawasan terhadap pelaksanaan perlu dilakukan, hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh kebijakan publik yang terkait dengan siklus anggaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berorientasi pada prioritas publik. Namun sebelum

sampai pada tahap pelaksanaan, anggota dewan harus mempunyai bekal pengetahuan mengenai anggaran sehingga nanti ketika melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran, anggota dewan telah dapat mendeteksi apakah ada terjadi kebocoran atau penyimpangan alokasi anggaran.

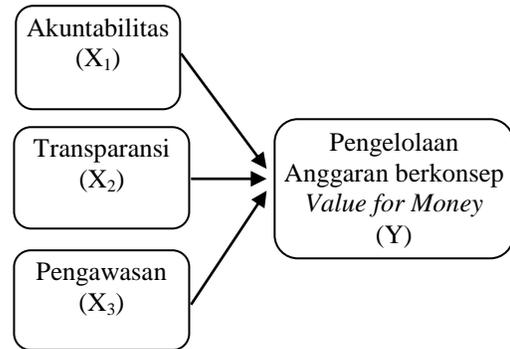
Anugriani (2014) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep value for money pada instansi pemerintah Kabupaten Bone yang mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Suparno (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengajukan hipotesis, bahwa pengawasan memiliki pengaruh terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* karna pengawasan anggaran dilaksanakan untuk meminimalisir kebocoran anggaran, dengan metode pembukuan yang tertib, dan metode pengawasan anggaran daerah sesuai undang-undang agar efektif dan efisien pada setiap satuan kerja perangkat daerah.

H₃: Pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep Value for Money.

Model Penelitian

Pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *Value for Money* pada satuan kerja perangkat daerah pada penelitian ini digambarkan dalam model berikut:



Gambar 1. Model Penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Provinsi Riau

Populasi dan sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya (Sekaran, 2006 : 123). Menurut Erlina (2007 : 74) sampel adalah bagian populasi yang digunakan untuk memperkirakan karakteristik populasi. Pengambilan sampel (sampling) adalah suatu proses yang dilakukan untuk memilih dan mengambil sampel secara 'benar' dari suatu populasi, sehingga dapat digunakan sebagai 'wakil' yang sah (dapat mewakili) bagi populasi tersebut.

Populasi dalam penelitian ini adalah Pegawai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah provinsi Riau yang berjumlah 39 SKPD. Responden dari penelitian ini adalah Pejabat

eselon III dan IV dibidang keuangan. Sampel dalam penelitian ini adalah Pegawai Badan dan Dinas di lingkungan SKPD Provinsi Riau. Untuk menentukan jumlah responden dari sampel dalam penelitian ini, penulis menggunakan rumus Slovin. Model rumus Slovin adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

$$n = \frac{613}{1 + 613(0,1)^2}$$

$n = 85,97$ maka dibulatkan menjadi 86 orang.

Keterangan:

n = Besarnya ukuran sampel

N = Jumlah populasi

e = Presisi yang diinginkan untuk diambil (10%)

Masing-masing Dinas dan Badan diambil sampel secara proporsional dengan menggunakan persamaan:

$$ni = \frac{Ni}{N} \times n$$

ni = Jumlah sampel pada Dinas i

Ni = Jumlah pegawai pada dinas i

N = Jumlah seluruh pegawai (populasi)

n = Jumlah seluruh sampel

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode survey melalui kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung kepada responden. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawabnya (Sugiono, 2012:137). Data diperoleh dalam penelitian ini dengan

cara menyebarkan kuesioner yang dilakukan sendiri oleh peneliti kepada responden, yaitu bendahara Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), staf akuntansi/pembukuan/keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala sub bagian keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), serta dibagikan kepada bagian Tata Usaha/Sekretariat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdapat di Provinsi Riau.

Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi berganda yang dilakukan dengan bantuan *Software SPSS for Windows Versi 19*, melalui tahapan pengujian sebagai berikut: Bentuk umum persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Keterangan:

Y = Pengelolaan Anggaran Berkonsep Value for Money

a = Konstanta

X_1 = Akuntabilitas

X_2 = Transparansi

X_3 = Pengawasan

$b_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi

e = Faktor Pengganggu

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif terdiri dari demografi responden dan variabel penelitian. Data demografi tersebut antara lain : jabatan, jenis kelamin, masa kerja, umur, tingkat pendidikan. Sedangkan statistik deskriptif variabel disajikan dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi memaparkan rata-rata (*mean*) dan standar deviasi.

Uji Kualitas Data Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Uji validitas pada penelitian ini dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor pertanyaan. Kriteria digunakan valid atau tidak valid apabila koefisien korelasi r kurang dari nilai r tabel dengan tingkat signifikansi 5% berarti butir pertanyaan tersebut tidak valid (Ghozali, 2006).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah suatu uji yang dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari suatu variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang dalam kuesioner konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika memberikan nilai *cronbach alpha* di atas 0,6 (Ghozali, 2006)

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2006) uji normalitas data adalah untuk menguji apakah sebuah model regresi, variabel dependen dan independen mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah jika distribusi data normal atau mendekati normal. Uji yang digunakan adalah Uji Kolmogorov Smirnov dan Normal PP Plot. Dalam uji Kolmogorov Smirnov nilainya signifikansinya di atas 0,05 maka distribusi data dinyatakan memenuhi asumsi normalitas. Kemudian dalam analisis grafik, jika data menyebar di sekitar garis

diagonal, berarti model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2006). Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolinearitas atau tidak yaitu dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2006).

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini, pengujian akan dilakukan Uji Glejser. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual $> 0,05$ maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. Uji lainnya melalui pola diagram pencar (*Scatterplot*). Jika *Scatterplot* tidak membentuk pola tertentu (menyebarkan) maka model regresi tidak mengalami gangguan heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Pengujian terhadap autokorelasi dalam suatu model penelitian dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t (sekarang) dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Pengujian autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin Watson. Jika Nilai Durbin Watson du

(Durbin Watson maksimal) dan 4-d1 (Durbin Watson minimal) maka terjadi autokorelasi.

Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji t. Uji t digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Prayitno, 2012). Kriteria pengujian untuk uji t adalah:

- a. H_0 diterima jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$.
- b. H_0 ditolak jika $t_{hitung} > t_{tabel}$.

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi (R^2) adalah sebuah koefisien yang menunjukkan persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen. Dan untuk mengetahui besarnya koefisien determinasi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dapat dilihat dari hasil kuadrat koefisien korelasi parsial (*adjusted R²*).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum dan Deskripsi Objek Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner langsung kepada responden. Dari 86 kuesioner yang disebarkan, semuanya dikembalikan dalam keadaan baik. Dan dari 86 kuesioner tersebut, maka diketahui karakteristik responden sebagai berikut:

Tabel 1
Karakteristik Responden

Karakteristik	F	%
Jenis Kelamin		
1. Laki-laki	64	74,42
2. Perempuan	22	25,58
Jumlah	86	100,00
Usia		
1. < 30 tahun	5	5,81
2. 30 – 49 tahun	67	77,91
3. \geq 50 tahun	14	16,28
Jumlah	86	100,00
Pendidikan		
1. S2	15	17,44
2. S1	62	72,09
3. Diploma	9	10,47
Jumlah	86	100,00

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Deskripsi Variabel Penelitian

Dari hasil pengumpulan data terhadap kuesioner, diperoleh deskriptif statistik masing-masing variabel sebagai berikut:

Tabel 2
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variabel	Teoritis	Aktual	
	Mean	Kisaran	Mean
Akuntabilitas	21	22-34	28,53
Transparansi	24	20-40	33,06
Pengawasan	27	26-42	34,87
Pengelolaan Anggaran	33	27-52	41,63

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Uji Kualitas Data

Hasil Uji Validitas

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji validitas sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Validitas

Variabel	r hitung	r tabel	Ket
Akuntabilitas	0,316- 0,525	0,212	Valid

Variabel	r hitung	r tabel	Ket
Transparansi	0,350- 0,664	0,212	Valid
Pengawasan	0,332- 0,691	0,212	Valid
Pengelolaan Anggaran	0,314- 0,547	0,212	Valid

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Hasil Uji Reliabilitas

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Nilai Kritis	Cronbach's Alpha	Ket
Akuntabilitas	0,6	0,680	Reliabel
Transparansi	0,6	0,791	Reliabel
Pengawasan	0,6	0,787	Reliabel
Pengelolaan Anggaran	0,6	0,764	Reliabel

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Hasil Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

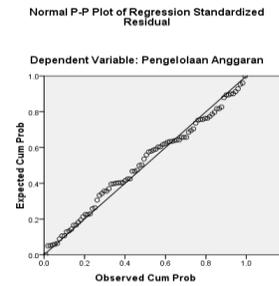
Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji Normalitas sebagai berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		86
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	2.91421328
Most Extreme Differences	Absolute	.068
	Positive	.053
	Negative	-.068
Kolmogorov-Smirnov Z		.635
Asymp. Sig. (2-tailed)		.815

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.



Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Dari Tabel diatas diperoleh nilai signifikansi sebesar $0,815 > 0,05$. Dan berdasarkan grafik *Normal Probability P-Plot* terlihat titik-titik menyebar di sekitar dan mengikuti garis diagonal. Dengan demikian dapat diketahui bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji multikolinieritas sebagai berikut:

Tabel 6
Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Akuntabilitas	.884	1.131
	Transparansi	.500	2.001
	Pengawasan	.503	1.990

a. Dependent Variable: Pengelolaan Anggaran

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Berdasarkan Tabel diatas diketahui nilai *variance inflation factor* (VIF) < 10 dan *tolerance* $> 0,10$. Maka dapat dinyatakan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi.

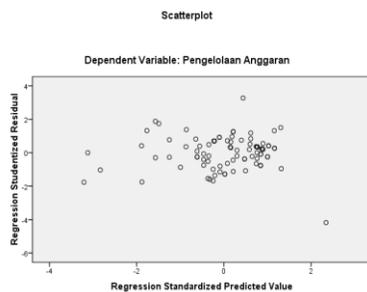
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji Heterokedastisitas sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Normalitas

Coefficients ^a		
Model		
	t	Sig.
1 (Constant)	1.363	.176
Akuntabilitas	-.748	.456
Transparansi	.448	.655
Pengawasan	-.344	.732

a. Dependent Variable: Abs_Res



Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Dari Tabel diatas diketahui signifikansi antara varaiabel independen dengan *absolut residual* > 0,05. Dan berdasarkan *scatterplot* terlihat bahwa data tersebar diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan demikian dapat diartikan bahwa model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh hasil uji autokorelasi sebagai berikut:

Tabel 8
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	2.140

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, Akuntabilitas, Transparansi

b. Dependent Variable: Pengelolaan Anggaran

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Berdasarkan Tabel diatas diketahui nilai durbin Watson terletak

antara dU dan 4-dU = 1,722 < 2,140 < 2,278. Dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi dalam model regresi.

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diperoleh persamaan regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = 1,510 + 0,442 X_1 + 0,379 X_2 + 0,430 X_3 + e$$

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan pengujian yang dilakukan secara parsial, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Variabel	T _{hitung}	Sig.	T _{tabel}	Kep.
Akuntabilitas	2,761	0,007	1,989	Diterima

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Dengan demikian maka hipotesis diterima. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa “Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau” diterima. Dari hasil pengujian diatas diketahui bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran, artinya semakin tinggi akuntabilitas anggaran maka akan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anugriani (2014) tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan

anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah Kabupaten Bone yang mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Adrianto (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan pengujian yang dilakukan secara parsial, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Variabel	T _{hitung}	Sig.	T _{tabel}	Kep.
Transparansi	2,998	0,004	1,989	Diterima

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Dengan demikian maka hipotesis diterima. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa **“Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau” diterima.** Dari hasil pengujian diatas diketahui bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran, artinya semakin tinggi transparansi anggaran maka akan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adrianto (2012) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan anggaran di Universitas Bina Nusantara yang mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa

Transparansi berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran.

Pengaruh Pengawasan Terhadap Pengelolaan Anggaran

Berdasarkan pengujian yang dilakukan secara parsial, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 11
Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Variabel	T _{hitung}	Sig.	T _{tabel}	Kep.
Transparansi	3,290	0,001	1,989	Diterima

Sumber : Hasil Penelitian, 2015

Dengan demikian maka hipotesis diterima. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa **“Pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau” diterima.** Dari hasil pengujian diatas diketahui bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap pengelolaan anggaran, artinya semakin tinggi pengawasan terhadap anggaran maka akan meningkatkan kualitas pengelolaan anggaran dan sebaliknya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Anugriani (2014) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada instansi pemerintah Kabupaten Bone yang mana hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran berkonsep *value for money*. Suparno (2012) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengawasan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran.

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau.
2. Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau.
3. Pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau.

Keterbatasan

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan pada lembaga-lembaga lainnya. Hal ini disebabkan kondisi di beberapa SKPD berbeda satu sama lain.
2. Tidak dilakukannya metode wawancara dalam penelitian, mengingat kesibukan dari pihak responden. Responden meminta agar kuesioner ditinggalkan, sehingga peneliti tidak bisa mengendalikan jawaban responden. Oleh karena itu, jawaban yang diberikan oleh responden belum tentu menggambarkan keadaan sebenarnya.
3. Data penelitian hanya dilakukan pada pertanyaan yang sifatnya tertutup, sehingga peneliti tidak mendapat argumen secara langsung dan detail dari responden secara keseluruhan.

Saran

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan acuan bagi Pemerintah Provinsi Riau dalam rangka meningkatkan pengeoloaan anggaran berbasis *value for money*.
2. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk menggunakan metode wawancara serta angket terbuka dalam penelitian, agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Disamping itu juga perlu menambahkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi pengelolaan anggaran berdasarkan karakteristik serta alat analisis yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, Pahalan. 2012. *Pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan Anggaran di Universitas Bina Nusantara* (DKI Jakarta)
- Anthony dan Govindarajan. 2005. *Management Control System*, Edisi 11, penerjemah: F.X. Kurniawan Tjakrawala, dan Krista. Penerbit Salemba Empat, Buku 2, Jakarta.
- Anugriani, Mulia, Rezki, 2014. *Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Pengawasan Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money Pada Instansi Pemerinth di Kabupaten Bone*. Makasar: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Hassanudin.
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan

- Perencanaan Pembangunan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 2002.
- Erlina, Sri Mulyani. 2007. *Metodologi Penelitian Bisnis : Untuk Akuntansi dan Manajemen*, Cetakan Pertama USU Press, Medan.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryanto dkk. 2007. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Edisi Kedua. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Maksum, Azhar. 2005. *Tinjauan Atas Good Corporate Governance di Indonesia Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Akuntansi Manajemen*. Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mardiasmo. 2005. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Mathis, R dan Jackson, W.2006. *Human Resources Development (Track MBA series/terjemahan)*. Jakarta; Prestasi Pustaka
- Moeljono, Djokosantoso. 2005. *Cultured, Budaya Organisasi dalam Tantangan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nordiawan, Deddi. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pieris, John dan Nizam Jim Wiryawan. 2008. *Etika Bisnis & Good Corporate Governance, Edisi Kedua*. Jakarta: Pelangi Cendekia.
- Pratuvaliandry. 2005. *Analisis Kinerja Badan Pengawas Daerah Kota Pare-Pare Dalam Pelaksanaan Pengawasan di Pemerintah Kota Pare-Pare*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Sarundajang, S.H 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta : Kata Hasta Pustaka.
- Sedarmayanti, 2009, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*, Bandung, Refika Aditama.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Sukirno, Sadono. 2005. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa.
- Suparno, 2012. *Pengaruh akuntabilitas keuangan daerah, Value for money, kejujuran, transparansi Dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah (Studi Kajian Pada Pemerintah Kota Dumai*. Medan: Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi USU.